

Dakwah Pencerahan dalam Mengembangkan Kehidupan yang Berkemajuan di Basis Masyarakat¹

Oleh: Asep Purnama Bahtiar²

“Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, men-sucikan mereka dan mengajarkan mereka Kitab dan Hikmah (As-Sunnah). Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata.” (Q.s. Al-Jumu`ah: 2)

Pengajian Ramadhan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 1435 H ini mengangkat tema “Dakwah Pencerahan Menuju Indonesia Berkemajuan” yang sebelumnya merupakan tema Tanwir Muhammadiyah di Samarinda, 23-25 Mei 2014. Dalam situasi Indonesia saat ini tema tersebut sangat strategis setidaknya karena dua hal. *Pertama*, menjadi titik fokus bagi konsolidasi internal Persyarikatan dan silaturahmi gagasan untuk mengelaborasi dakwah pencerahan dalam berbagai aspek kehidupan. *Kedua*, sebagai momentum bagi aksentuasi (pengutamaan dan penitikberatan) gerakan dakwah pencerahan di tengah realitas Indonesia yang majemuk dengan segala problematika dan dinamikanya.

Berbagai kasus mutakhir di tanah air menunjukkan fenomena yang mencemaskan ketika negara begitu dominan dan mendikte banyak urusan masyarakat dan sekaligus menafikan hak publik dan akses partisipatorisnya untuk turut memperbaiki dan membenahinya. Sebagai misal, kasus UN 2013 untuk tingkat SMA/SMK yang kisruh dan carut-marut memamerkan arogansi kekuasaan Kemendikbud atas protes dan kritik masyarakat luas bahwa UN itu

¹Disampaikan dalam Pengajian Ramadhan Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Kampus Univeristas Muhammadiyah Yogyakarta, 4-6 Ramadhan 1435 H/1-3 Juli 2014.

²Asep Purnama Bahtiar, S.Ag., M.Si., Ketua Majelis Penidikan Kader Pimpinan Pusat Muhammadiyah; Dosen FAI Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

menyimpang dari prinsip dan hakikat pendidikan serta melanggar UU Sisdiknas 2003 dan putusan Mahkamah Agung tahun 2009.

Sementara itu, negara tidak berdaya dan kehilangan nyali untuk menjaga kedaulatan bangsa, kepentingan nasional dan kebutuhan hidup masyarakat luas ketika berhadapan dengan korporasi multinasional dan agen-agen neoliberalisme dan neokapitalisme di tanah air. Kewibawaan negara, supremasi hukum dan kemandirian ekonomi bangsa ini mengalami krisis karena tergadaikan untuk melayani kepentingan pihak asing dan para kompradornya.

Panggung politik dan kekuasaan di tanah air juga belum bisa menyuguhkan perilaku politik yang memberikan tuntunan dan etika kebangsaan bagi kebijakan publik, termasuk yang dipamerkan oleh partai politik yang suka mengklaim jujur, bersih dan peduli atau partai yang mengatakan anti-korupsi. Penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi terus berlangsung di ranah legislatif, eksekutif dan institusi-institusi lain yang semestinya memberikan garansi dan prioritas bagi kepentingan masyarakat luas.

DIMENSI DAKWAH

Dalam konteks Indonesia “yang sedang berubah” Muhammadiyah sudah mendesak untuk melakukan langkah-langkah implementatif dan sistemik dari seluruh kebijakan dan program strategisnya sebagai produk muktamar ke-46 di Yogyakarta (2010). Upaya ini di samping untuk membuktikan semangat pembaruan yang menjadi watak gerakan Muhammadiyah, juga untuk mempertahankan tradisi bermuhammadiyah yang senantiasa berusaha keras untuk membumikan gagasan-gagasan besar serta merealisasikan misi dan program Persyarikatan bagi kemaslahatan publik dan kemajuan bersama. Inilah sesungguhnya yang menjadi bagian penting dari aksentuasi gerakan dakwah pencerahan dewasa ini.

Dalam perspektif teologis, dakwah adalah panggilan atau seruan bagi umat manusia menuju jalan Allah (Q.s. Yusuf: 108), yaitu jalan menuju Islam (Q.s. Ali `Imran: 19). Strategi dan implementasi dakwah mesti mempertimbangkan tiga dimensi yang saling berkaitan, yaitu: dimensi kerisalahan (Q.s. Al-Maidah: 67); dimensi kerahmatan (Q.s. Al-Anbiya: 107); dan dimensi kesejarahan (Q.s. Al-Hasyr: 18).

Dengan tiga dimensi tersebut, dakwah merupakan upaya untuk menyampaikan ajaran Islam dan menyebarkan nilai kebajikannya untuk kelayakan hidup manusia hingga bisa menyejarah, kini dan kelak. Karena itu, selain mengajak seseorang atau sekelompok orang (masyarakat) agar merespons *Risalah Islamiyyah*, dakwah juga bermakna kontinu agar mengamalkan ajaran Islam atau merealisasikan pesan-pesan dan nilai-nilai Islam ke dalam kehidupan yang bisa dirasakan oleh masyarakat luas.

Dakwah dalam konteks ini juga dapat bermakna pembangunan kualitas sumberdaya manusia, pengentasan kemiskinan, memerangi kebodohan dan keterbelakangan. Dakwah juga bisa berarti penyebarluasan rahmat Allah (*rahmatan lil`alamin*). Dengan pembebasan, pembangunan dan penyebarluasan ajaran Islam, berarti dakwah merupakan proses untuk mengubah kehidupan manusia atau masyarakat dari kehidupan yang tidak islami menjadi suatu kehidupan yang islami. (PP Muhammadiyah, 2004: 21).

Perlu untuk digarisbawahi, dakwah telah menjadi bagian dari identitas Muhammadiyah sejak awal berdirinya sampai sekarang dan demikian selanjutnya. Dalam usianya yang sudah memasuki abad kedua, Muhammadiyah harus terus berupaya untuk selalu melakukan aktualisasi dan kontekstualisasi dakwah dalam kehidupan umat dan bangsa untuk membangun peradaban utama. Sikap ini diambil karena dorongan kesadaran bahwa selama ini selain banyak keberhasilan dan kisah sukses yang telah diukir oleh Muhammadiyah,

juga masih ada kekurangan dan kelemahan yang harus segera dibenahi dalam gerakan dakwahnya.

Dalam realitas yang kompleks di tanah air kita perlu untuk bersikap apresiatif atas dinamika dan kinerja gerakan dakwah Muhammadiyah dalam berbagai aspek kehidupan umat dan bangsa. Apresiasi ini penting untuk ditindaklanjuti dengan sikap korektif atas kelemahan dan kekurangannya selama ini dalam upaya membangun peradaban utama serta mewujudkan maksud dan tujuannya di bumi Indonesia.

Peradaban utama yakni peradaban Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Peradaban utama tersebut merupakan suatu peradaban *Khaira Ummah* (umat terbaik, umat pilihan) sebagai manifestasi objektif atau objektivikasi dari kehidupan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya yang tumbuh dan berkembang di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peradaban utama yang lahir dari gerakan dakwah dan tajdid Muhammadiyah di bumi Indonesia tersebut pada perkembangan yang lebih luas dapat menyinari kehidupan umat manusia secara universal, sebagai matarantai dari misi kerisalahan atau gerakan Islam yang dibawa dan disebarluaskan Muhammadiyah untuk mewujudkan Islam sebagai agama *rahmatan lil-'alamin* di muka bumi.

AKSENTUASI DAKWAH

Dewasa ini Muhammadiyah perlu membuktikan kembali komitmen dan semangat dakwah pencerahan agar Persyarikatan ini bisa terus laju dan maju dalam gerakannya. Komitmen dan spirit ini penting untuk merespons globalisasi serta menyikapi problematika kebangsaan dan persoalan kemanusiaan maupun dalam memperteguh identitas gerakan Muhammadiyah. *Elan vital* gerakan tersebut berhulu pada pandangan keagamaan khas Muhammadiyah, iman dan

kemajuan, yang senantiasa diupayakan bermuara bagi keutamaan peradaban dan terjelma dalam berbagai aspek kehidupan umat manusia yang bermartabat.

Itulah modal penting bagi Muhammadiyah untuk mewujudkan aksentuasi gerakan dakwah pencerahan. Masalah dan tantangan dakwah yang semakin beragam ternyata menyediakan ruang dakwah baru yang menuntut kreativitas dan inovasi dari ormas Islam yang sudah menapaki abad kedua ini. Munculnya kelas sosial baru dengan gaya hidup transisinya, terutama di perkotaan dan sub-urban, membutuhkan sentuhan dan strategi dakwah yang pas dan tepat. Begitu pula merebaknya kasus dan problem sosial-politik-ekonomi-budaya yang kian rumit (seperti pembodohan massa, komodifikasi agama, nasib buruh migran, eksploitasi tenaga kerja anak, perdagangan manusia, konflik tanah adat, konflik petani dan pemodal besar, kemiskinan kultural dan struktural, praktek korupsi yang semakin menggila, manipulasi kekuasaan, dsb.) merupakan arena bagi aksentuasi gerakan dakwah Muhammadiyah.

Keniscayaan tersebut tidak bisa dinafikan karena Muhammadiyah dan bangsa Indonesia bukan lagi sedang berhadapan dengan globalisasi, tetapi sudah masuk dalam pusarannya. Permasalahan dan tantangan dakwah di era globalisasi ini harus disikapi secara kritis dan bijak. Bukan isolasi diri dan penolakan tanpa alternatif yang harus dikedepankan, tetapi respons kritis dan sikap pro-aktif menjadi alternatif yang bisa dilakukan oleh Muhammadiyah dalam merealisasikan aksentuasi gerakan dakwah pencerahan di zaman kesejagatan ini.

Dalam konteks inilah pembaruan paradigma dakwah Muhammadiyah berikut dengan model dan strateginya menjadi agenda mendesak untuk segera dirumuskan secara matang. Sebuah aksentuasi gerakan dakwah dengan empat pilar yang sinergis: transendensi; emansipasi/liberasi; humanisasi; dan

objektifikasi. Semangat pembaruan ini juga menjadi bagian dari gerakan tajdid Muhammadiyah yang selalu mengarah pada kemajuan dengan dasar pijakan iman yang autentik.

Dalam kesadaran tersebut aksentuasi gerakan dakwah Muhammadiyah tidak bisa ditunda dan ditawar lagi. Aksentuasi ini setidaknya untuk memotret ulang peta dan gerakan dakwah Muhammadiyah selama satu abad ini untuk kemudian dioreintasikan ke dalam konteks dakwah di era globalisasi yang lebih produktif dan solutif untuk isu-isu kebangsaan. Pembaruan paradigma, model dan strategi gerakan dakwah Muhammadiyah sudah pasti harus dibangun dan ditata secara utuh dan *feasible*, yang kemudian bisa memperkaya gagasan yang implementatif bagi Muhammadiyah ke depan.

DAYA HIDUP MASYARAKAT

Dalam konteks pengembangan masyarakat setidaknya ada dua aspek yang perlu ditindaklanjuti, yakni daya hidup masyarakat dan kultivasi kritisisme. Daya hidup masyarakat ini urgen dengan proposisi bahwa publik tidak bisa berharap banyak terhadap kalangan elite politik untuk bisa menata dan meruwat dunia politik yang sudah kusut-masai ini. Bukankah sudah menjadi rahasia umum bahwa panggung politik di tanah air kita sudah lama hiruk-pikuk dengan kepalsuan dan gegap-gempita dengan kepura-puraan tetapi tuna dari keteladanan dan kalis dari karakter kenegarawanan.

Berkaitan dengan hal tersebut, hemat saya, sudah mendesak untuk segera merealisasikan agenda kebangsaan dengan format dakwah pencerahan yang bisa memperkuat posisi masyarakat atau rakyat di negeri ini. Hal ini bukan saja karena dalam banyak kasus masyarakat masih ter subordinasi oleh negara tetapi juga rentan menjadi korban ketamakan kalangan elite, kerakusan para budak materi dan keculasan kasta penghamba kekuasaan kendati dengan memeralat

ajaran agama. Terlebih lagi dalam konteks globalisasi yang menjadi kendaraan hegemoni negara-negara maju, maka proyek penguatan kapasitas dan kesadaran masyarakat itu menjadi tidak bisa ditawar-tawar dan ditunda-tunda lagi.

Publik atau masyarakat di negeri pada umumnya masih mudah diprovokasi dan dimanipulasi, sementara di sisi lain juga mengidap penyakit “mudah lupa” dengan berbagai kebijakan negara dan tindakan para elite politik yang merugikan kepentingan publik. Di tengah sikap mental seperti itu harus tetap ada optimisme bahwa publik dan bangsa ini masih mempunyai kemauan untuk belajar dan berubah, umpamanya dengan saling berbagi banyak hal di antara sesama sehingga memiliki kemampuan untuk memperbaiki dan menata ulang kehidupannya agar semakin maju dan berkeadaban.

Itulah yang disebut dengan daya hidup (*elan vital*) masyarakat. Dalam tingkat dan kemajuan yang berbeda, dengan daya hidupnya itu masyarakat memiliki budaya atau kebudayaan dan potensi yang bisa diaktualisasikan untuk membangun kritisisme publik. Relevan dengan proposisi tersebut maka budaya atau kebudayaan yang dimaksud adalah seperti yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat (1994), yakni sebagai suatu kompleks dari ide, gagasan, nilai, norma, peraturan dan sebagainya; kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat

Budaya tadi bisa dilihat dari aktivitas hidup sehari-hari dan interaksi sosial yang berlangsung dalam kehidupan publik. Karena itu pada dasarnya budaya bertalian erat dengan cara dan kebiasaan hidup manusia, dan hal itu tidak bisa lepas dari *mode of thought*, sikap mental, dan alam pikiran yang dimilikinya, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat dan kesadaran kolektif bangsa dalam jalinan sosialnya.

Kurang lebih seperti itulah daya hidup masyarakat dan relasinya dengan kebudayaan, baik yang dilakoni secara sendirian maupun dijalani bersama-

sama. Sebetulnya masyarakat itu dinamis dan bisa menerima perubahan atau bisa diajak untuk berubah ke arah yang lebih baik kendati negara memainkan kekuasaannya untuk melakukan represi dan distorsi.

KULTIVASI KRITISISME

Karena relasi kekuasaan yang masih timpang serta mengingat potensi daya hidup masyarakat dan watak dinamis budaya, maka di sinilah arti penting kultivasi kritisisme (*criticism cultivation*) yang perlu didesain sebagai agenda kebangsaan bagi penguatan dan pencerahan publik. Proyek semacam ini sebetulnya bukan hal baru di tanah air. Organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan kelompok-kelompok kritis lainnya telah lama bergerak di wilayah tersebut sejak dasarwarsa '70-an dan '80-an. Bahkan sejak awal abad ke-20 organisasi seperti Syarikat Dagang Islam (1911 [yang berubah menjadi Syarikat Islam tahun 1912]) dan Persyarikatan Muhammadiyah (1912) sudah merintis dan memulai gerakan pencerahan dan pemberdayaan itu yang kemudian disusul Persatuan Islam (1923) dan NU (1926).

Istilah kultivasi biasanya banyak dipergunakan di dunia pertanian atau *agriculture*. Tetapi secara leksikal, kultivasi juga erat berkaitan dengan pengembangan akal pikiran, pengayaan wawasan intelektual dan kepentingan pembelajaran atau pelatihan. Dalam *Webster's New World Dictionary* (1991: 337) arti *cultivation* di antaranya sebagai "*to improve by care, training, or study; refine [to cultivate one's mind]*." Pengertian kultivasi ini relevan dengan muatan dan arah kritisisme masyarakat.

Kritisisme, hemat saya, adalah daya dan sekaligus visi hidup dalam bertindak untuk membuat suatu keputusan dan menganalisis masalah (yang mengandung kekeliruan dan potensi yang merugikan kemaslahatan publik) hingga bisa menghasilkan kesimpulan yang bernilai dan alternatif yang lebih

baik. Dengan kritisisme, individu atau publik tidak akan mudah percaya dan menerima begitu saja atas informasi, berita, kebijakan dan fakta yang dijejalkan oleh negara atau penguasa atau dalih politik yang memperalat ajaran agama, termasuk berita dan tayangan yang disajikan berlebihan oleh media massa.

Dalam kritisisme, nalar dan akal budi kembali diperankan secara tepat bukan sekedar rasio instrumental yang sarat kalkulasi ekonomi dan hanya menjadikan rasio sebagai alat. Memparafrase teori kritis, maka kritisisme dimaksud juga bertalian kuat dengan nalar obyektif yang bersifat universal untuk melakukan pembebasan (emansipasi) manusia atau publik dari perbudakan kekuasaan, struktur sosial yang timpang, dan juga pernyataan yang manipulatif dan menyesatkan.

Bagi kepentingan masyarakat tadi perlu disusun desain kultivasi kritisisme yang efektif dan sekaligus produktif. Penyadaran dan pemberdayaan yang bergumul langsung dalam problema kehidupan masyarakat dengan mempertimbangkan karakter dan latar masalah yang mungkin tidak sama antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya perlu dilakukan secara lebih intensif oleh ormas, LSM, kalangan intelektual, gerakan mahasiswa, aktivis gerakan sosial baru, dan kelompok-kelompok kritis lainnya. Program “Belajar Bersama Rakyat”, “Pendidikan Politik untuk Publik”, “Pendidikan Kewargaan Partisipatoris”, dan yang sejenisnya bisa menjadi alternatif untuk mengkultivasikan kritisisme masyarakat.

Dalam ranah sosial budaya ini pula gagasan tentang modal sosial-budaya bangsa bisa memperoleh tempat untuk diaktualisasikan. Di sinilah selalu ada keterkaitan antara modal sosial-budaya suatu bangsa dengan kehidupan yang dijalaninya, berikut dengan interaksinya dalam konteks nasional, regional, dan global.

Berkaitan dengan hal itu pula, maka penguatan modal sosial-budaya untuk menolak doktrin-doktrin terorisme dan gerakan radikalisme tidak bisa lepas dari keberadaan dan partisipasi masyarakat atau komponen bangsa dengan berbagai organisasi dan institusi yang ada di dalamnya. Ruang publik dan institusi ini merupakan tempat bagi tumbuh dan berlakunya modal sosial-budaya dimaksud. Karena itu pula beralasan kalau partisipasi masyarakat dan *civil society* diapresiasi, misalnya, untuk kepentingan gerakan kontraterorisme dan deradikalisme.

MODAL SOSIAL-BUDAYA

Berdasarkan paparan tadi—daya hidup masyarakat dan kultivasi kritisisme--maka nilai penting dari penguatan modal sosial-budaya masyarakat memperoleh relevansinya. Sikap optimis dan keniscayaan ini penting karena bangsa kita sebetulnya masih memiliki potensi dan nilai-nilai positif yang bisa terus diperkuat kapasitasnya.

Modal sosial budaya (biasanya ditulis terpisah: modal sosial [*social capital*] dan modal budaya [*cultural capital*]) merupakan istilah yang muncul dalam ilmu sosial dan humaniora. Dalam wacana umum modal sosial lebih sering dipergunakan daripada modal budaya, dengan asumsi ketika berbicara modal sosial maka aspek budaya atau ranah kebudayaan juga akan ikut tercakup.

Modal sosial merupakan jaringan-jaringan kerja antarpersonal yang menyediakan masyarakat dengan sumberdaya atau status yang dimilikinya sehingga mereka bisa menggali di area-area lain dari kehidupan sosial dan kemampuan untuk melakukan sesuatu secara potensial dalam perolehan modal ekonomi atau modal budaya. (Craig Calhoun, 2002: 443).

James Coleman (1988) menyebutkan modal sosial dibatasi oleh fungsinya. Modal sosial bukan sebuah entitas yang berdiri sendiri, tetapi sebuah varietas

dari entitas-entitas yang berbeda yang secara umum memiliki dua karakteristik: entitas-entitas tadi semuanya terdiri dari beberapa aspek dari struktur sosial, dan memfasilitasi tindakan-tindakan yang pasti dari pelaku-pelaku baik pribadi maupun kelompok dalam struktur.

Berpijak pada pengertian tadi, modal sosial-budaya selalu bersinggungan atau dimunculkan dari keberadaan jaringan sosial dan organisasi sosial. Kedua institusi ini pada dasarnya merupakan *locus* atau sumber terbangunnya modal sosial tersebut, baik dalam sebuah komunitas atau masyarakat luas.

Sebagai contoh ormas atau organisasi sosial seperti Muhammadiyah yang memiliki lembaga pendidikan atau program pemberdayaan masyarakat bisa memfasilitasi adanya kegiatan untuk mensosialisasikan dan membangun kesadaran publik mengenai bahaya terorisme dan radikalisme. Melalui jaringan sosial atau organisasi sosial itulah modal sosial-budaya bangsa dibangun untuk mengembangkan masyarakat berkemajuan. Dalam interaksi sosial yang terjadi secara langsung atau tidak langsung, dan melalui struktur sosial yang ada dalam kehidupan bangsa, nilai-nilai dan kesadaran untuk memperkuat kapasitas modal sosial budaya bangsa bisa dilakukan secara partisipatif.

Di samping itu, yang tidak kalah strategisnya adalah inseminasi dan pengayaan nilai-nilai kebangsaan sebagai bagian dari penyadaran dan pemberdayaan bangsa akan jati diri bisa dilakukan melalui berbagai kegiatan sosial dan program kemasyarakatan yang berwawasan kebangsaan dan nasionalisme. Pembentukan nilai dan transformasinya dalam kehidupan sosial budaya bangsa kemudian menjadi pintu masuk untuk memperkaya kesadaran dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia yang harus senantiasa memelihara keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pelibatan dan partisipasi seperti tadi, dengan memparafrase pandangan Daoed Joosef (dalam Bantarto Bandoro, 1995), akan melahirkan dua hal berikut ini bagi penguatan kapasitas sosial budaya bangsa. *Pertama*, partisipasi yang ideal dari masyarakat ini adalah tindakan yang dilakukan secara sukarela karena didorong oleh pertimbangan nuraninya sendiri dan bukan berupa pengarahannya dari desakan dari penguasa (pemerintah). *Kedua*, partisipasi masyarakat yang ideal tersebut akan terwujud bila persepsi resmi (pemerintah) mengenai terorisme dan radikalisme identik dengan persepsi yang dihayati oleh masyarakat.

Disadari memang bukan tugas yang ringan untuk mengembangkan kehidupan yang berkemajuan di basis masyarakat. Di sinilah tugas dan panggilan dakwah pencerahan itu harus dilakukan oleh pimpinan, kader dan warga Muhammadiyah secara simultan dan sinergis sebagai kelanjutan tugas kerasulan sebagaimana dinyatakan dalam Q.s. al-Jumu'ah: 2 yang dikutip di awal makalah ini. *Wal-Lahu a'lam bish-shawab.*[]